

PERAN POSBINDU DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Shinta Chyntia Agustina

LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas cenderung mempunyai prevalensi penyakit tidak menular yg lebih tinggi dibandingkan dengan populasi tanpa disabilitas, misalnya hipertensi, depresi dan diabetes. Namun demikian penyandang disabilitas memiliki hambatan untuk mengakses sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Pos pembinaan terpadu (Posbindu) disabilitas merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat disabilitas dan pendampingnya, upaya tersebut berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif pada penyandang disabilitas.

TUJUAN

Untuk mengetahui peran Posbindu Disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan.

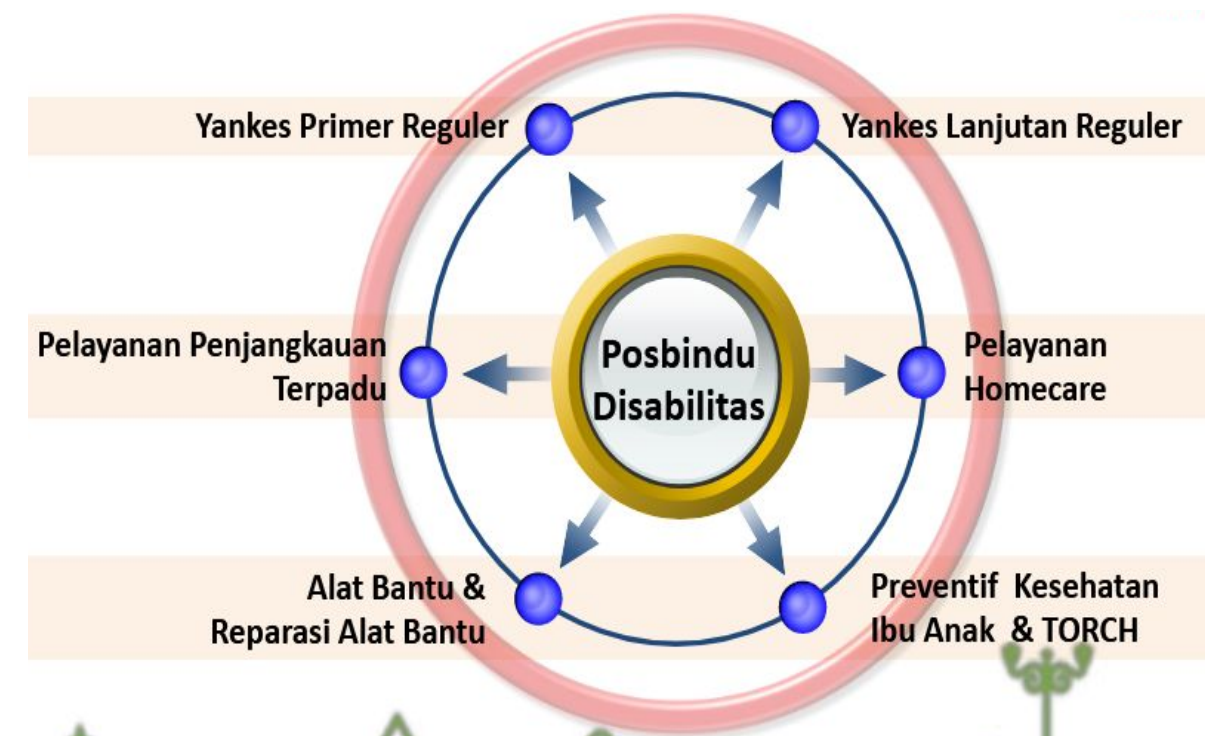
METODE

Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumen dan literatur yang tersedia, wawancara dengan pemegang program di Bapel Jamkesos DIY, Puskesmas serta observasi pelaksanaan Posbindu disabilitas.

HASIL

Posbindu Disabilitas di DIY berbeda dengan pelaksanaan Posbindu di daerah lain dikarenakan peserta dimulai pada usia anak-anak sampai usia lansia, dilaksanakan setiap bulan pada saat pertemuan bulanan organisasi disabilitas, adanya pembiayaan tenaga medis (dokter) yang datang tiga bulan sekali dan rehabilitasi oleh Bapel Jamkesos DIY. Pelaksanaan Posbindu disabilitas menggunakan tiga prinsip utama Posbindu yaitu anggota yang berjumlah minimal 20 orang, kemandirian, dan pencatatan yang sistematis dan berkala. Bagi pasien disabilitas yang kesulitan menjangkau layanan kesehatan, dokter akan mendatangi rumah pasien tersebut (pra homecare).

Jejaring pelayanan Posbindu disabilitas :

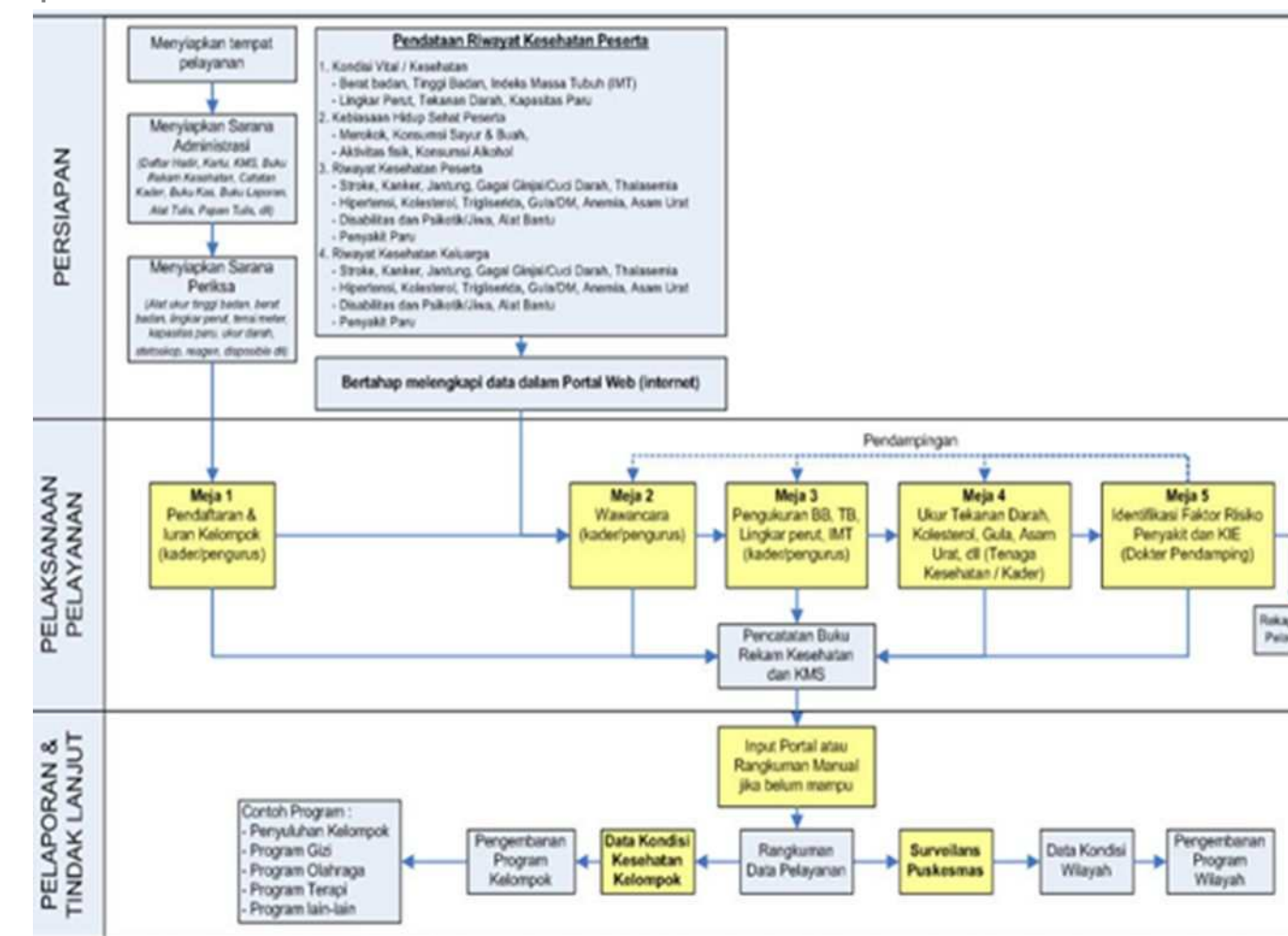


Posbindu disabilitas mulai dilaksanakan bulan Agustus 2017. Sampai dengan sekarang ada 12 kelompok, jumlah anggota sebanyak 559 disabilitas dan 723 pendamping disabilitas

Paket manfaat Posbindu disabilitas :

Posbindu Pendamping Disabilitas	Posbindu Disabilitas
Skrining PTM (fisik, stick)	Skrining PTM (fisik, stick)
Rujukan lab dasar indikasi medik	Rujukan lab dasar indikasi medik
Deteksi dini PTM oleh Medis	Deteksi dini dan KIE oleh Medis :
Pemantauan Paska Rawat RS	-PTM
Kesehatan Ibu Anak (next)	-Penyakit Risiko disabilitas
Pra Homecare (next)	-Kebutuhan dan koreksi / followup alat bantu
Skrining Depresi (next)	Rujukan medik
	Rujukan alat bantu ke Spesialis
	Edukasi Paska Rehabilitasi Sosial / Medik
	Pra - homecare

Manajemen Pelayanan Posbindu disabilitas :



Permasalahan yang dihadapi :

1. Keterbatasan fisik/mental penyandang disabilitas menghambat mobilitas
2. Organisasi penyandang disabilitas sangat banyak, bermacam-macam dan terfragmentasi
3. Upaya promotif dan preventif belum menjadi hal yang “ main setting “ apalagi mengenai disabilitas yang merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas
4. Kepercayaan stakeholder lintas sektor terhadap program Posbindu disabilitas masih rendah
5. Isu pemberdayaan masyarakat kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial



KESIMPULAN

Dengan adanya Posbindu disabilitas, pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses pelayanan kesehatan dapat terpenuhi, walaupun masih ada beberapa masalah. Sehingga diperlukan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

1. Menyatukan kebutuhan pelayanan kesehatan antar organisasi disabilitas yang berbeda-beda, sehingga isu pemberdayaan masyarakat tidak kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial
2. Melakukan koordinasi antara organisasi disabilitas, Puskesmas Dinas Kesehatan, Balai Jamkesos dan lintas sektor program bahwa upaya promotif dan preventif merupakan sesuatu hal yang “ main setting “ walaupun disabilitas bukan merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) esensial di Puskesmas
3. Perlunya dukungan, pembinaan dan pengawasan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, pemberian pelayanan di Puskesmas sebagai rujukan kegiatan Posbindu Disabilitas dan home care sebagai tindak lanjut dari kegiatan Posbindu disabilitas
4. Perlu dibuat *road map* dan pedoman evaluasi dari kegiatan Posbindu disabilitas yang melibatkan semua stakeholder terkait.

REFERENSI

1. Ervin, David A., Brian Hennen, Joav Merrick, and Mohammed Morad. 2014. “Healthcare for Persons with Intellectual and Developmental Disability in the Community.” *Frontiers in Public Health* 2(July): 1–8. <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2014.00083/abstract>
2. Hung, William W, Joseph S Ross, and Kenneth S Bookvar. 2013. “Association of Chronic Diseases and Impairments with Disability in Older Adults : A Decade of Change ?” *Med Care* 50(6): 501–7.
3. Jamkesos. 2017. “Jamkesos DIY.” *Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*. http://jamkesos.jogjaprovo.go.id/index.php/news/detail_news/pengembangan-posbindu-disabilitas
4. Krahn, Gloria L, Deborah Klein Walker, and Rosaly Correa-de-araujo. 2015. “Persons With Disabilities as an Unrecognized Health Disparity Population.” *American Journal of Public Health* 105: 198–206.
5. Menkumham. 2016. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” *Menkumham*: pasal 1 no.1.
6. Pharr, J R, and T Bungum. 2012. “Health Disparities Experienced by People with Disabilities in the United States: A Behavioral Risk Factor Surveillance System Study.” *Global journal of health science* 4(6): 99–108
7. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa. 2012. “PERDA DIY TENTANG DISABILITAS NO 4 TAHUN 2012.” : 1–43.